Gubernur Jatim: Seluruh Bupati/ Walikota Harus Lakukan Percepatan Penyaluran Bansos Kepada Masyarakat Terdampak PPKM Darurat

Jumat, 23 Juli 2021

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendesak seluruh bupati dan walikota untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat. Hal ini dilakukan karena banyak bantuan yang belum terserap, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BTNT) tahun 2020 dan 2021 yang baru tersalurkan 50% dan alokasi Bansos senilai Rp 1,233 Triliun yang baru terserap 21,66%.

Gubernur juga menekankan pentingnya data akurat terkait penyaluran bansos, karena masih banyak data yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Ia meminta agar data segera diinput dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi.

Khofifah juga menyoroti penurunan realisasi Dana Desa yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan pedesaan. Ia meminta semua pihak untuk segera menuntaskan penyaluran bantuan seperti Bansos, BTNT dan BLT agar kebutuhan masyarakat desa tercukupi sebelum BPS turun ke lapangan untuk mengecek data kemiskinan pada September mendatang.

Selain itu, Gubernur juga meminta percepatan penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten/Kota yang baru terealisasi 26,3%. JPS dinilai penting untuk memberikan rasa aman dan penguatan ekonomi di tengah PPKM Darurat.

Gubernur mengingatkan bupati/walikota untuk mengecek data penyaluran bantuan agar dapat memastikan semua penerima bantuan sudah mendapatkannya selama PPKM. Harapannya, bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi masa sulit ini.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.